



**RILIS KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
TERKAIT PERSIAPAN DAN KESIAPAN PILKADA SERENTAK 2024
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024 – 2025
KE KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT
TANGGAL 11 – 13 SEPTEMBER 2024**

Komisi II DPR RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat pada tanggal 11 September 2024 dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terkait persiapan dan kesiapan pilkada serentak tahun 2024. Kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI dipimpin oleh Dr. Saan Mustopa, M.Si. Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Nasdem. Kunjungan kerja spesifik hari ini diikuti juga oleh beberapa Anggota Komisi II DPR RI dari berbagai fraksi, dan didampingi pula oleh pejabat dari Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra Komisi II DPR RI, yakni dari Kementerian Dalam Negeri.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024 merupakan Pilkada terbesar di dunia yang diselenggarakan di 545 daerah yaitu di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota dengan melibatkan ratusan ribu bahkan jutaan penyelenggara pilkada. Pilkada kali ini juga merupakan sejarah, karena sejak pertama kali pilkada langsung dilakukan pada tahun 2005, baru kali ini pilkada diselenggarakan serentak secara nasional. Karena pilkada serentak tahun 2024 merupakan sejarah pertama, maka berbagai aspek kesiapan dalam penyelenggaraan pilkada menjadi sangat penting, seperti: ketersediaan anggaran melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Daftar Pemilih Tetap (DPT), rekrutmen penyelenggara adhoc, indeks kerawanan, persiapan tahapan penetapan calon, dan keamanan. Penyelenggara pilkada, aparat keamanan, dan partai politik memiliki beban yang cukup berat mengingat pemilu serentak pada 14 Februari 2024 baru selesai tetapi harus segera menghadapi pilkada serentak. Partai politik harus mencari 1.090 orang untuk dicalonkan, belum lagi berlakunya putusan MK yang menyebabkan dinamika politik. Komisi II DPR RI ingin penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 berkualitas, transparan, akuntabel, professional, dan berintegritas. Salah satu kunci pilkada berkualitas ada pada penyelenggara pilkada yang berintegritas.

Bupati Kabupaten Karawang dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang telah siap menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2024, berbagai langkah mitigasi terhadap potensi masalah yang terjadi pasca pemilu 2024 yang lalu antara lain dengan melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder yaitu KPU Kabupaten Karawang terkait pemutakhiran data pemilih, Dinas Komunikasi dan Informasi terkait kesiapan jaringan mengantisipasi blank spot terutama di wilayah pegunungan, aparat keamanan (Satpol PP, Kesbangpol, Polri) terkait aspek keamanan, dan stakeholder lainnya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Karawang telah memberikan NPHD melalui 2 tahap kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Karawang guna memastikan penyelenggaraan pilkada serentak berjalan lancar.

KPU Kabupaten Karawang menyampaikan bahwa NPHD yang telah diterima sebesar Rp71.329.355.471,- dari Pemerintah Kabupaten Karawang. Selain itu dukungan dari Pemerintah Kabupaten Karawang berupa fasilitasi di 30 kecamatan dan dukungan personel pada sekretariat PPK dan PPS. Rekrutmen badan adhoc telah dilaksanakan dengan baik sesuai tahapan sehingga terbentuk PPK, PPS, dan pantarlih. Jumlah TPS sebanyak 3.791 TPS reguler dan 2 TPS lokasi khusus di lapas dengan jumlah maksimal pemilih per TPS sebanyak 600 orang. Terdapat 2 pasangan calon yang akan maju pada pilkada serentak tahun 2024.

Bawaslu Kabupaten Karawang menyampaikan bahwa NPHD yang telah diterima sebesar Rp17.262.450.000,- dari Pemerintah Kabupaten Karawang. Pengawasan dilakukan dalam setiap tahapan, pada tahapan pemutakhiran dan penyusunan DPT Bawaslu Kabupaten Karawang menemukan 357 pelanggaran yang dilakukan pantarlih. Sebanyak 115 saran dan perbaikan sudah disampaikan kepada KPU Kabupaten Karawang. Berdasarkan hasil pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024 Kabupaten Karawang masuk kategori rawan sedang. Beberapa isu strategis dalam penyelenggaraan pemilihan 2024 dalam peta kerawanan 2024, antara lain: netralitas ASN, praktik politisasi uang, polarisasi masyarakat dan dukungan publik, penggunaan media sosial untuk kontestasi, konteks keserentakan pemilu dan pemilihan, keamanan, dan lain-lain. Bawaslu Kabupaten Karawang dan Sentra Gakkumdu telah menyiapkan beberapa langkah persiapan penanganan pelanggaran antara lain: peningkatan kapasitas jajaran panwascam dalam penanganan pelanggaran serta rapat rutin pembahasan potensi pelanggaran pidana pemilihan yang dilaksanakan sebanyak 2x kegiatan rapat disetiap bulannya.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang menyampaikan bahwa wajib KTP el di Kabupaten Karawang hampir mencapai 100% tersisa 4 orang. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang memastikan tidak ada penerbitan surat keterangan pada saat pilkada karena stok blanko KTP el tersedia.

Pelayanan KTP el juga 1 hari selesai dan jika penduduk yang tidak mempunyai KTP el maka dapat menggunakan KTP digital.

Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Karawang Forkopimda, KPU dan Bawaslu Kabupaten Karawang atas kesiapannya dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2024. Beberapa catatan yang disampaikan anggota Komisi II DPR RI pada kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Karawang antara lain:

1. Komisi II DPR RI meminta KPU dan Bawaslu Kabupaten Karawang agar memanfaatkan anggaran NPHD yang diberikan Pemerintah Kabupaten Karawang secara efektif dan efisien di setiap tahapan pilkada serentak tahun 2024 dalam rangka memastikan pemenuhan hak pilih.
2. Komisi II DPR RI meminta KPU dan Bawaslu Kabupaten Karawang meningkatkan profesionalitas dan integritas penyelenggara dalam rangka memastikan penyelenggaraan pilkada serentak yang berkualitas, akuntabel, dan bebas dari politik uang.
3. Sebagai Kawasan industri terbesar di Indonesia dan daerah penyangga ibukota Daerah Khusus Jakarta, Komisi II DPR RI meminta KPU Kabupaten Karawang memastikan bahwa para pekerja industri tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara termasuk jika membutuhkan tambahan TPS di kawasan industri.
4. Mengingat bakal pasangan calon yang akan bersaing di pilkada serentak berasal dari unsur pemerintahan daerah, Komisi II DPR RI mendorong Bawaslu Kabupaten Karawang meningkatkan pengawasan terhadap potensi pelanggaran netralitas ASN agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan kondusif serta terhindar dari polarisasi ASN.

Kabupaten Karawang, 11 September 2024,
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Karawang.